

PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI HUTAN ADAT NEGERI HUKURILA

DEVELOPMENT OF A SOCIAL FORESTRY PROGRAM BASED ON COMMUNITY PARTICIPATION IN THE HUKURILA CUSTOMARY FOREST

Alicia Grenid Lussy¹, Thomas M. Silaya^{2*}, Marthina Tjoa³

^{1,2,3} Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233. Indonesia

*Email Korespondensi: th_silaya@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan hutan adat merupakan strategi untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan adat tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan program perhutanan sosial, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Negeri Hukurila, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2025 dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap 30 rumah tangga, informan kunci tokoh adat, aparat negeri, dan pihak Balai Perhutanan Sosial, serta dianalisis menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial telah diimplementasikan melalui pemberian Alat Ekonomi Produktif, khususnya pengolahan kolang-kaling dan pengembangan Bang Pesona, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat berada pada kategori tinggi, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, namun masih perlu ditingkatkan pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Faktor pendukung utama partisipasi meliputi peran tokoh adat, tingkat pengetahuan, dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola, sedangkan keterbatasan insentif ekonomi menjadi kendala.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi masyarakat, hutan adat, Negeri Hukurila.

ABSTRACT

The management of customary forests is a strategic approach to integrating local knowledge and community traditions into natural resource management. Customary forests are not only essential for environmental sustainability but also hold significant social and cultural value for local communities. This study aims to examine the development of social forestry programs, analyze the level of community participation, and identify factors influencing community participation in the management of the Hukurila Customary Forest, Sirimau District, Ambon City. The research was conducted in October 2025 using a descriptive qualitative and quantitative approach. Data were collected through structured interviews with 30 households, key informants including customary leaders, village officials, and officers from the Social Forestry Agency, and analyzed using a Likert scale. The results indicate that the social forestry program has been implemented through the provision of Economic Productive Tools, particularly for sugar palm fruit (kolang-kaling) processing and the development of Bang Pesona, contributing to local economic improvement. The levels of community understanding and participation were categorized as high, especially during the planning and implementation stages, while participation in decision-making and evaluation remained moderate. Key supporting factors include the role of customary leaders, community knowledge, and trust in managing institutions, whereas limited economic incentives remain a major constraint.

Keywords: social forestry, community participation, customary forest, Hukurila Village.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan ekosistem dengan keanekaragaman jenis yang tinggi dan berfungsi sebagai salah satu penyangga penting dalam kehidupan makhluk hidup di dunia. Keberadaan hutan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kebutuhan pangan dan penyediaan bahan industri yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan pemanfaatan hasil hutan, terdapat dampak negatif terhadap kondisi ekologi hutan itu sendiri. Margono (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi manusia berdampak pada eksploitasi sumberdaya hutan yang berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan deforestasi dan degradasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan peran kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan (Rusadi, 2021).

Pengelolaan hutan dengan menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan sektor kehutanan (Suryandari, et al, 2012). Prinsip-prinsip tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini mengembangkan bentuk pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Adat, sebagaimana tercantum dalam Permen LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak, didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (MHA) (KLHK, 2017). Hutan adat merujuk pada area hutan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat adat dengan menerapkan praktik pengelolaan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan lokal dan tradisi budaya. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat yang mengelolanya (Colchester, 2016). Dalam konteks global, hutan adat diakui sebagai elemen penting dalam konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim (Gonzalez et al., 2020).

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dilaksanakan oleh MHA berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku sesuai fungsinya. Hutan adat dikelola, dimiliki, dan dimanfaatkan secara komunal oleh suatu komunitas MHA (KLHK, 2017). Hal ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6740/MENLHK-PSKL/Kum.1/12/2016, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya alam sekaligus berkewajiban mendistribusikan kekayaan alam tersebut untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pengelolaan hutan adat merupakan strategi untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan adat tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat dapat memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya hutan, masyarakat dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif juga dapat meningkatkan legitimasi pengelolaan hutan dan memperkuat identitas budaya masyarakat (FAO, 2012).

Negeri Hukurila merupakan salah satu desa atau negeri adat yang terletak di Pulau Ambon, tepatnya di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Keberadaan masyarakat adat di Maluku telah mendapat pengakuan dengan ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, termasuk Negeri Hukurila (Anonim, 2023). Masyarakat adat Negeri Hukurila memiliki hubungan historis yang erat dengan hutan di sekitar desa mereka. Hutan tersebut bukan hanya merupakan sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat (Gonzalez et al., 2020). Namun, meskipun masyarakat adat memiliki pengetahuan yang berharga tentang pengelolaan hutan, keterlibatan mereka masih sering terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan komersial (Murray et al., 2019).

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adat di Negeri Hukurila dapat dilihat dalam lima bentuk, yaitu buah pikiran, tenaga, harta benda, keahlian dan keterampilan, serta dalam bentuk sosial. Dari lima bentuk partisipasi tersebut, yang paling dominan adalah partisipasi dalam bentuk buah pikiran, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran dalam suatu kegiatan atau rapat-rapat (Pelu, 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Hukurila sudah berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Selain itu, masyarakat Negeri Hukurila telah memanfaatkan keberadaan hutan dengan menghasilkan beberapa produk, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, di antaranya madu dan minuman kesehatan. Namun, selain kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sebagai bentuk partisipasi tersebut, perlu juga diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam partisipasi tersebut.

Negeri Hukurila dengan sejumlah potensi sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya potensi hasil hutan, membuka kemungkinan untuk diakses atau dikelola oleh masyarakat. Namun,

pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya (KLHK, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji lebih mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Negeri Hukurila. Kajian ini penting dalam konteks pelestarian dan pengembangan kelestarian hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan adil.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Negeri Hukurila tidak hanya bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep dasar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat merujuk pada keterlibatan aktif komunitas lokal, terutama masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan dan praktik pengelolaan sumber daya hutan. Partisipasi ini mencakup berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari konsultasi hingga kolaborasi penuh dalam pengelolaan. Masyarakat adat, dengan pengetahuan tradisional dan hubungan kultural yang kuat dengan hutan, memiliki wawasan unik yang dapat berkontribusi pada pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu diteliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta bagaimana upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan tersebut, mengingat tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pengembangan perhutanan sosial, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengembangan perhutanan, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya partisipasi masyarakat sebagai basis dalam pengelolaan hutan adat di Negeri Hukurila.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2025 yang berlokasi di Negeri Hukurila, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Alat dan Objek Penelitian

Alat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini bahan yang digunakan yaitu, daftar pertanyaan (kuisisioner). Sedangkan untuk alat yaitu Alat tulis menulis, kamera untuk dokumentasi kegiatan, perekam suara (*recorder*), dan laptop.

Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat sekitar Kawasan Hutan di Negeri Hukurila. Tokoh Masyarakat, dan Staf Desa atau Negeri untuk mengetahui Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Hutan dan Staf Balai Perhutanan Sosial Ambon.

Metode Penelitian

Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Kriteria sampel mencakup anggota rumah tangga yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan hutan adat, aparat pemerintah negeri dan tokoh adat sebagai pengatur tata kelola hutan adat, serta petugas Balai Perhutanan Sosial yang mengimplementasikan program perhutanan sosial di lokasi hutan adat.

Jenis Data penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi lapangan secara langsung, serta data sekunder yang bersumber dari instansi terkait, literatur, dan dokumen kantor desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur terhadap 30 kepala rumah tangga untuk mengukur partisipasi masyarakat dan informan kunci dari tokoh desa serta Balai Perhutanan Sosial Ambon, observasi sistematis untuk menggambarkan kondisi lokasi dan aktivitas masyarakat di hutan adat, serta dokumentasi berupa pencatatan profil desa dan foto aktivitas pengelolaan hutan adat.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

1) Deskriptif kualitatif

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menginterpretasikan hasil wawancara dan observasi. Data berupa narasi, deskripsi, dan dokumen dianalisis mengikuti tahapan Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono (2004), yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, eksplorasi informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat, analisis dengan klasifikasi dan perbandingan data dari berbagai sumber untuk mencari keterkaitan dengan fokus penelitian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2) Analisis Kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert

Menurut Kusmayadi dan Endar Sugiarto (2000) dalam Latifah (2015), skala Likert merupakan metode pengukuran sikap yang menggunakan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif untuk mengetahui tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan

peneliti. Dalam penelitian ini, penetapan skor menggunakan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1, dengan nilai antara kedua skor tersebut disesuaikan dengan jumlah opsi jawaban yang disediakan. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengembangan hutan adat di Negeri Hukurila.

Tabel 1. Skala likert

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	KS	Setuju	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Berikut merupakan perhitungan untuk mendapatkan kelas interval (Sugiyono, 2014):

$$interval = \frac{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}{\text{banyaknya klasifikasi (kelas)}}$$

Sehingga dapat diketahui bahwa panjang interval kelas masing-masing tingkat partisipasi masyarakat desa Hukurila dapat dilihat sebagai berikut :

Skor Maksimal :5
Skor Minimal :1
Banyaknya Kelas :4
Interval :0,8

Tabel 2. Interval Kelas Dan Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat

KATEGORI		INTERVAL SKOR	
Sangat Tinggi	4,2	< Skor ≤	5
Tinggi	3,4	< Skor ≤	4,2
Sedang	2,6	< Skor ≤	3,4
Rendah	1,8	< Skor ≤	2,6
Sangat Rendah	1	< Skor ≤	1,8

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa kategori skor Sangat tertinggi yaitu dengan bobot nilai 4,2 - 5 dinyatakan Sangat tinggi, Kategori skor Tinggi dinyatakan dengan bobot nilai 3,4 - 4,2 dinyatakan Tinggi, kategori Skor sedang dinyatakan dengan bobot nilai 2,6 – 3,4 dinyatakan Sedang, kategori Skor rendah dinyatakan dengan bobot nilai 1,8 – 2,6 dinyatakan Rendah Sedangkan untuk kategori skor sangat rendah dinyatakan dengan bobot nilai sebesar 1 - 1,8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 30 responden rumah tangga yang dipilih melalui metode purposive sampling dari masyarakat Negeri Hukurila yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Adat. Pemilihan

responden didasarkan pada kriteria bahwa mereka adalah anggota rumah tangga yang telah dewasa (kepala keluarga atau anggota keluarga usia produktif) dan terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan adat.

Tabel 3. Karakteristik Demografi Responden (30 Rumah Tangga)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	17	56,7%
	Perempuan	13	43,3%
Umur (Tahun)	30-39	9	30,0%
	40-49	11	36,7%
	50-59	8	26,7%
	≥60	2	6,6%
	Rata-rata	43,7 tahun	-
Pendidikan	SD	6	20,0%
	SMA	17	56,7%
	D3	7	23,3%
Pekerjaan Utama	Petani	16	53,3%
	Ibu Rumah Tangga	6	20,0%
	Pedagang	4	13,3%
	Pegawai/Raja	4	13,3%
Lama Tinggal	Sejak lahir	8	26,7%
	>20 tahun	22	73,3%

Berdasarkan data karakteristik responden, mayoritas responden (56,7%) adalah laki-laki dengan tingkat keterlibatan yang lebih dominan dalam kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan hutan adat. Kelompok usia produktif (40-49 tahun) merupakan proporsi terbesar dengan 36,7% dari total responden, diikuti kelompok usia 30-39 tahun dengan 30,0%, menunjukkan bahwa responden didominasi oleh usia kerja produktif.

Tingkat pendidikan responden menunjukkan variasi yang baik: mayoritas (56,7%) berpendidikan SMA, diikuti D3 (23,3%), dan SD (20,0%). Hal ini mengindikasikan tingkat literasi yang cukup baik di masyarakat Negeri Hukurila. Pekerjaan utama responden didominasi oleh petani (53,3%), yang konsisten dengan latar belakang ekonomi masyarakat Negeri Hukurila sebagai komunitas yang bergantung pada pertanian dan pengelolaan hutan. Lama tinggal responden menunjukkan bahwa 73,3% telah tinggal lebih dari 20 tahun, dengan 26,7% sejak lahir, mengindikasikan keterikatan yang sangat kuat dengan wilayah dan tradisi adat setempat.

Implementasi Program Perkembangan Perhutanan Sosial

Implementasi Program Perhutanan Sosial di Negeri Hukurila tidak hanya berfokus pada aspek pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian Alat Ekonomi Produktif (AEP). Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pengembangan usaha

pengolahan kolang-kaling sebagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pasar yang cukup baik.

Pemberian AEP kolang-kaling meliputi peralatan pengolahan, perebusan, penirisan, dan pengemasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta efisiensi kerja masyarakat. Dengan adanya alat tersebut, masyarakat dapat mengolah hasil buah aren secara lebih higienis dan bernilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong kemandirian ekonomi kelompok Perhutanan Sosial.

Selain itu, program juga mendukung pengembangan Bang Pesona sebagai sarana penunjang ekonomi kreatif dan promosi potensi lokal. Bang Pesona berfungsi sebagai tempat display, pemasaran, dan promosi produk-produk hasil Perhutanan Sosial, termasuk produk olahan kolang-kaling dan hasil hutan lainnya. Keberadaan Bang Pesona diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat identitas ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.

Secara keseluruhan, penambahan AEP kolang-kaling dan Bang Pesona dalam implementasi Program Perhutanan Sosial di Negeri Hukurila menunjukkan adanya integrasi antara pengelolaan sumber daya hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan pendampingan berkelanjutan, penguatan kelembagaan kelompok, serta dukungan pemasaran agar manfaat program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Program Perhutanan Sosial

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Perhutanan Sosial

Dimensi	Skor Rata-rata	Kategori	Interpretasi
Sosialisasi Program yang Jelas	3,43	Tinggi	Mayoritas responden menyatakan sosialisasi program cukup jelas
Pemahaman Tujuan Program	3,17	Tinggi	Pemahaman tujuan cukup namun masih perlu ditingkatkan
Kesesuaian dengan Kebutuhan Mata Pencaharian	3,23	Tinggi	Program dirasa sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal
Penghargaan terhadap Hukum Adat	3,80	Tinggi	Program sangat menghargai nilai-nilai hukum adat
Dukungan Sumber Daya (Dana, Alat, Pelatihan)	2,70	Sedang	Dukungan sumber daya masih terbatas dan perlu ditingkatkan
Rata-rata	3,27	Tinggi	Program Perhutanan Sosial dipahami dengan baik oleh mayoritas masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program

Received: 17 Desember 2025; Revised: 27 Januari 2026; Accepted: 31 Januari 2026; Published: 17 Februari 2026

Vol. 2 No. 11. Februari 2026 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

773

perhutanan sosial berada pada kategori **tinggi dengan skor rata-rata 3,27**. Dimensi yang paling kuat adalah penghargaan terhadap hukum adat dengan skor 3,80 (kategori tinggi), menunjukkan bahwa program perhutanan sosial telah dipersepsikan masyarakat sebagai suatu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Hal ini sangat penting karena menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai-nilai program dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Sosialisasi program (skor 3,43) menunjukkan kategori tinggi, mengindikasikan bahwa upaya komunikasi tentang program kepada masyarakat telah dilakukan dengan cukup efektif. Kesesuaian program dengan kebutuhan mata pencaharian (skor 3,23) juga berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat merasakan program relevan dengan kondisi ekonomi lokal mereka. Namun, pemahaman tujuan program (skor 3,17) masih berada pada batas bawah kategori tinggi, mengindikasikan perlunya intensifikasi komunikasi tujuan program kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih mendalam.

Dimensi yang memerlukan perhatian khusus adalah dukungan sumber daya dengan skor 2,70 (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan keterbatasan signifikan dalam hal alokasi dana, peralatan, dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi program jangka panjang dan perlu menjadi prioritas dalam perencanaan keberlanjutan program.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial

Dimensi Partisipasi	Skor Rata-rata	Kategori	Interpretasi
Keterlibatan dalam Perencanaan	3,37	Tinggi	Masyarakat terlibat aktif dalam tahap perencanaan program
Kontribusi Tenaga/Ide pada Pelaksanaan	3,30	Tinggi	Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan cukup signifikan
Pengambilan Keputusan	2,93	Sedang	Partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas
Masukan pada Tahap Evaluasi	2,73	Sedang	Keterlibatan dalam evaluasi program masih perlu ditingkatkan
Rasa Kepemilikan Hutan Adat	3,83	Tinggi	Masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang sangat kuat
Rata-rata	3,23	Tinggi	Masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam program

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial berada pada kategori **tinggi dengan skor rata-rata 3,23**. Dimensi yang paling menonjol adalah rasa kepemilikan hutan adat dengan skor 3,83 (kategori tinggi), yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ikatan emosional kuat dan kesadaran tinggi terhadap pengelolaan hutan adat

mereka. Rasa kepemilikan yang kuat ini merupakan fondasi penting untuk keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Keterlibatan dalam perencanaan (skor 3,37) dan kontribusi tenaga/ide pada pelaksanaan (skor 3,30) menunjukkan kategori tinggi, mengindikasikan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam tahap operasional program. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi lokal telah bekerja dengan baik dalam mengaktifkan keterlibatan masyarakat di tingkat grassroots.

Namun, dimensi pengambilan keputusan (skor 2,93) dan masukan pada tahap evaluasi (skor 2,73) berada pada **kategori sedang**. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat aktif dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan. Ini merupakan tantangan penting, karena partisipasi yang sejati memerlukan keterlibatan di semua tahap, bukan hanya pada tahap eksekusi. Perbaikan dalam dimensi ini akan memastikan pengelolaan hutan yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Tabel 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor	Skor Rata-rata	Kategori	Interpretasi
Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola/Pemerintah Desa	3,40	Tinggi	Masyarakat memiliki kepercayaan yang cukup terhadap institusi pengelola
Insentif Ekonomi	2,70	Sedang	Insentif ekonomi yang ditawarkan masih belum optimal
Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Program	3,33	Tinggi	Pengetahuan masyarakat tentang program sudah cukup baik
Peran dan Dukungan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat	3,93	Tinggi	Kepemimpinan adat sangat mendukung program
Keterbukaan Informasi dan Transparansi	3,27	Tinggi	Informasi program cukup terbuka bagi masyarakat
Rata-rata	3,33	Tinggi	Faktor-faktor pendukung partisipasi secara umum cukup kuat

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menunjukkan skor rata-rata 3,33 yang berada pada kategori **tinggi**. Faktor paling signifikan adalah peran dan dukungan tokoh adat/tokoh masyarakat dengan skor 3,93 (kategori tinggi), mengindikasikan bahwa kepemimpinan lokal memiliki pengaruh determinan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial. Faktor ini menjadi pilar utama kesuksesan program karena tokoh adat dan masyarakat memiliki legitimasi kultural dan otoritas dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola (skor 3,40), pengetahuan dan pemahaman program (skor 3,33), serta transparansi informasi (skor 3,27) semuanya berada pada kategori tinggi dan berkontribusi positif terhadap partisipasi. Hal ini menunjukkan fondasi yang cukup kuat dalam hal institusi, pengetahuan, dan komunikasi. Ketiga faktor ini bekerja bersama menciptakan ekosistem yang kondusif untuk partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

Faktor yang memerlukan perhatian khusus adalah insentif ekonomi dengan skor 2,70 (kategori sedang). Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi yang langsung dirasakan dari program masih belum seoptimal yang diharapkan masyarakat. Keterbatasan insentif ekonomi dapat menjadi faktor pembatas dalam mempertahankan motivasi partisipasi jangka panjang, terutama bagi komunitas yang bergantung pada hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari. Aspek ini perlu menjadi fokus pengembangan program ke depan.

Tabel 7. Ringkasan Kategorisasi Tingkat Partisipasi Masyarakat (30 Responden)

Kategori Partisipasi	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi (4,2 - 5,0)	0	0,0%
Tinggi (3,4 - 4,2)	15	50,0%
Sedang (2,6 - 3,4)	10	33,3%
Rendah (1,8 - 2,6)	5	16,7%
Sangat Rendah (1,0 - 1,8)	0	0,0%
Total	30	100,0%
Rata-rata	3,28 (Tinggi)	-

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengembangan perhutanan sosial di Hutan Adat Hukurila berada pada kategori **tinggi dengan skor rata-rata 3,28**. Analisis per responden menunjukkan distribusi yang beragam namun tetap positif:

- **50% responden (15 orang)** berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat aktif dan terus-menerus berpartisipasi dalam program.
- **33,3% responden (10 orang)** berada pada kategori sedang, mengindikasikan bahwa sekira sepertiga masyarakat memiliki partisipasi yang cukup namun masih dapat ditingkatkan.
- **16,7% responden (5 orang)** berada pada kategori rendah, menunjukkan bahwa masih ada segmen masyarakat dengan keterlibatan yang terbatas.

Distribusi ini mengindikasikan bahwa program memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi mayoritas masyarakat, namun masih perlu upaya khusus untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang berada pada kategori sedang dan rendah.

Dinamika Pemahaman dan Partisipasi

Temuan penelitian menunjukkan dinamika yang menarik antara tingkat pemahaman program (3,27) dan tingkat partisipasi aktual (3,23). Kedua dimensi berada pada kategori tinggi dengan skor

yang hampir seimbang, menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara pemahaman dan aksi. Masyarakat yang memahami program dengan baik cenderung berpartisipasi lebih aktif, dan sebaliknya, pengalaman partisipasi memperkuat pemahaman mereka tentang program.

Aspek penghargaan terhadap hukum adat (3,80) dalam pemahaman program berkorelasi positif dengan rasa kepemilikan hutan adat (3,83) dalam partisipasi. Kedua skor tinggi ini mencerminkan bahwa program perhutanan sosial telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan mekanisme pengelolaan modern, sehingga menciptakan legitimasi kultural yang kuat.

Tantangan Struktural: Sumber Daya dan Insentif Ekonomi

Temuan yang paling signifikan adalah konsistensi skor rendah pada dua dimensi: dukungan sumber daya (2,70) dan insentif ekonomi (2,70). Kedua skor identik ini mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya secara langsung berpengaruh pada keterbatasan insentif ekonomi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Ini menunjukkan tantangan fundamental dalam implementasi program.

Aspek ini penting karena masyarakat Negeri Hukurila adalah komunitas dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, di mana mayoritas (53,3%) bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang terbatas. Keterbatasan insentif ekonomi dapat mengakibatkan: - Berkurangnya motivasi jangka panjang untuk partisipasi - Tingginya peluang masyarakat beralih ke aktivitas ekonomi alternatif yang lebih menguntungkan - Rendahnya kapasitas masyarakat untuk berinvestasi dalam kegiatan pengelolaan hutan yang belum menghasilkan manfaat ekonomi signifikan

Peran Kepemimpinan Adat sebagai Faktor Determinan

Skor tertinggi pada dimensi dukungan tokoh adat (3,93) menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal memiliki peran dominan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini konsisten dengan konteks sosial budaya Negeri Hukurila, di mana sistem pemerintahan adat (Raja dan Saniri Negeri) masih memegang otoritas kultural yang kuat.

Temuan ini memiliki implikasi penting: kesuksesan program perhutanan sosial di Negeri Hukurila sangat tergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemimpin adat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan program harus memastikan bahwa kepemimpinan adat tetap terlibat aktif dan merasakan manfaat dari program.

Keterlibatan Perempuan dalam Program

Data menunjukkan bahwa 43,3% responden adalah perempuan, namun dari pekerjaan utama, mayoritas keterlibatan perempuan adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (20,0% dari total). Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam program perhutanan sosial masih

terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu (seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu) daripada pengambilan keputusan strategis.

Variasi skor partisipasi perempuan (berkisar dari 2,60 hingga 3,87) menunjukkan ada heterogenitas dalam tingkat keterlibatan perempuan, dengan beberapa perempuan menunjukkan partisipasi tinggi. Ini mengindikasikan peluang untuk lebih menginkluskikan peran perempuan melalui program-program yang dirancang khusus.

Implikasi untuk Keberlanjutan Program

Tingkat partisipasi 50% dalam kategori tinggi dan 33,3% dalam kategori sedang menunjukkan bahwa mayoritas (83,3%) masyarakat memiliki tingkat partisipasi setidaknya sedang atau di atasnya. Ini merupakan indikasi positif untuk keberlanjutan program. Namun, 16,7% masyarakat dengan partisipasi rendah perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan inklusivitas dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Untuk memastikan keberlanjutan, program perlu mengatasi gap antara partisipasi operasional (perencanaan dan pelaksanaan) dengan partisipasi strategis (pengambilan keputusan dan evaluasi). Saat ini, masyarakat lebih aktif dalam tahap operasional (skor 3,37 dan 3,30) namun lebih pasif dalam tahap strategis (skor 2,93 dan 2,73). Model participatory management yang lebih inklusif perlu dikembangkan.

KESIMPULAN

Program pengembangan perhutanan sosial di Hutan Adat Negeri Hukurila didukung oleh karakteristik masyarakat produktif dengan keterikatan kuat terhadap hutan serta pemberian Alat Ekonomi Produktif (AEP) yang meningkatkan ekonomi lokal melalui pengolahan kolang-kaling dan Bang Pesona, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan namun masih memerlukan peningkatan pada tahap evaluasi dan pengawasan, dengan faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan tentang perhutanan sosial, manfaat ekonomi, peran tokoh adat dan pemerintah, serta dukungan pendampingan menjadi basis penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2023 UU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Lindungi Masyarakat Adat di Maluku. (<https://www.aman.or.id/news/read/uu-masyarakat-adat-dibutuhkan-untuk-lindungi-masyarakat-adat-di-maluku> , Publish tanggal 11 Juli 2023).
- Borrini-Feyerabend, G., Kothari, A., & Oviedo, G. 2013. Governance of Protected Areas. Best Practice Guidelines.

- Colchester, M. 2016. *Indigenous Peoples and Customary Use of Forests: A Comparative Analysis*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, UK.
- FAO. 2012. The Role of Forests in Rural Livelihoods. Food and Agriculture Organization.
- Gonzalez, P., Neilson, R. P., Lenihan, J. M., & Drapek, R. J. 2020. Global patterns in the vulnerability of ecosystems to vegetation shifts due to climate change. *Global Ecology and Biogeography*, 19(6): 755-768.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Hutan Adat Wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Buku Panduan Perhutanan Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Latifah, S. 2015. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*.
- Margono. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Murray, G., King, L., & Stickley, T. 2019. The marginalization of indigenous peoples in forest governance: Challenges and opportunities. *Environmental Policy and Governance*, 29(4): 245-258.
- Pelu, 2024. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hukurila*.
- Rusadi, 2021. *Strategi pengembangan program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan di kecamatan kindang kabupaten bulukumba*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Suryandari, et al. 2012. “Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) Dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Lpd Se-Kecamatan Negara)”. JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol: 10 No: 1 Tahun 2019 e- ISSN: 2614 – 1930